

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2017) Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Makassar . Objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Kota Makassar periode 2012-2015. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan model kontribusi . Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

(1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Makassar selama 4 tahun atau periode 2012-2015 pada umumnya telah efektif dengan tingkat perkembangan yang terus meningkat. (2) Pendapatan asli kota Makassar pada tahun 2012-2015 masih belum setiap tahunnya dapat terealisasi dan cenderung menurun. (3) Kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang pada setiap tahun yang diteliti. Kurangnya kontribusi ini dikarenakan pengoptimalan Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal, masih ada beberapa objek pajak yang sedang dibangun nilai pajaknya belum jelas yang belum diketahui subjeknya dan beberapa wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban pajak bumi dan bangunannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhono dan Sulastri (2017) Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. Objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Karawang tahun periode

2011-2015. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang berupa analisis rasio, Analisis rasio yang digunakan adalah rasio kontribusi dan rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : kontribusi setiap pos pajak lokal terhadap penduduk lokal Pendapatan Kabupaten Karawang termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 1% hingga 20%. Tingkat Efektivitas untuk setiap pajak daerah di Kabupaten Karawang adalah kategori yang sangat efektif dengan rata-rata rasio efektivitas lebih tinggi dari 100%.

Penelitian yang dilakukan oleh Ifa (2017) Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember. Objek penelitian pada Kabupaten Jember dengan melihat kontribusi pajak daerah, retribusi daerah terhadap PAD. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis pertumbuhan, analisis kontribusi dan analisis efektifitas pajak dan retribusi daerah. Hasil penelitian Rata-rata pertumbuhan retribusi daerah terbesar yaitu retribusi penyedotan dan penyediaan, sementara rata-rata pertumbuhan retribusi terendah yaitu retribusi tanda daftar perusahaan. Rata-rata kontribusi retribusi daerah tertinggi yaitu retribusi pelayanan kesehatan sedangkan rata-rata kontribusi retribusi daerah yang terkecil yaitu retribusi ijin pengelolaan pertambangan dan energy. Tingkat efektifitas yang tergolong sangat efektif adalah pajak parkir. Sedangkan pajak yang tergolong pajak yang tidak efektif adalah pajak air tanah. Sementara retribusi pajak daerah yang tergolong efektif adalah retribusi pemakaian kendaraan daerah. Kemudian retribusi yang tergolong cukup efektif adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sedangkan retribusi yang tergolong kurang efektif adalah retribusi penyedotan dan penyediaan. Retribusi yang tergolong tidak efektif adalah retribusi sewa rumah dinas.

Penelitian yang dilakukan Utama dan Syafruddin (2017) Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumbawa Barat, Tahun 2011-2016. Objek penelitian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbawa Barat tahun 2011-2016. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Data diolah menggunakan analisis rasio efektivitas, efisiensi dan kontribusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode 2011-2016, penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai kategori sangat efektif, dan biaya pemungutan mencapai kategori kurang efisien, sedangkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah mencapai kategori kurang.

Penelitian yang dilakukan Yuliasuti dan Dewi (2017) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. Objek penelitian ini adalah penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yakni analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya rasio efektivitas retribusi daerah dan besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2011-2015. Hasil analisis menunjukkan secara keseluruhan penerimaan dari retribusi daerah menggambarkan kinerja yang baik dan apabila dilihat dari penggolongan tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Denpasar tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif yaitu rata-rata sebesar 119,02%. Realisasi penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan, tetapi hal ini tidak sebanding dengan keadaan persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah yang mengalami fluktuasi. Rata-rata kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar sebesar 7,39%, dengan kriteria nilai interpretasi masih sangat kurang. Hal ini membuktikan peranan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil.

Tabel 2.1 :
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Objek / Analisis	Hasil
Rahman (2017)	Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Makassar	Objek : Dinas Pendapatan Kota Makassar periode 2012-2015 Teknik analisis : analisis deskriptif dengan menggunakan model kontribusi	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Makassar selama 4 tahun telah efektif dengan tingkat perkembangan yang terus meningkat. Pendapatan asli masih belum setiap tahunnya dapat terealisasi dan cenderung menurun. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang pada setiap tahun yang diteliti.
Suhono dan Sulastrri (2017)	Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang	Objek : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Karawang tahun periode 2011-2015 Teknik analisis: metode penelitian kualitatif yang berupa analisis rasio kontribusi dan rasio efektivitas.	Kontribusi setiap pos pajak lokal terhadap penduduk lokal Pendapatan termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 1% hingga 20%. Tingkat Efektivitas untuk setiap pajak daerah kategori yang sangat efektif dengan rata-rata rasio efektivitas lebih tinggi dari 100%.

Nama Peneliti	Judul	Objek / Analisis	Hasil
Ifa (2017)	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember	Objek : Kabupaten Jember Teknik analisis : analisis pertumbuhan, analisis kontribusi dan analisis efektifitas pajak dan retribusi daerah	Tingkat efektifitas yang tergolong sangat efektif adalah pajak parkir. Sedangkan pajak yang tergolong pajak yang tidak efektif adalah pajak air tanah. Sementara retribusi pajak daerah yang tergolong efektif adalah retribusi pemakaian kendaraan daerah.
Sutama dan Syafruddin (2017)	Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumbawa Barat, Tahun 2011-2016	Objek : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbawa Barat tahun 2011-2016 Teknik analisis: analisis rasio efektifitas, efisiensi dan kontribusi	Penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai kategori sangat efektif, dan biaya pemungutan mencapai kategori kurang efisien, sedangkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah mencapai kategori kurang.
Yuliastuti dan Dewi (2017)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar	Objek : Penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Teknik analisis : analisis deskriptif kuantitatif, rasio efektivitas retribusi daerah dan kontribusi	Realisasi penerimaan retribusi daerah masih sangat kecil. Realisasi penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan, tetapi hal ini tidak sebanding dengan keadaan persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang mengalami fluktuasi.

2.2. Kajian Pustaka

1. Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan. Pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah tersebut antara lain adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); Badan Pengawasan Keuangan ; investor; kreditor; dan donatur; analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah; rakyat; pemerintah daerah lain; dan pemerintah pusat, yang kesemuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah (Halim dan Kusufi, 2013).

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan Halim (2010). Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2010). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan

penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

3. Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan Penerimaan Pajak Daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil (Mahmudi, 2010). Kontribusi positif adalah kontribusi tersebut membuat sebuah kemajuan, bukan menurunkan ataupun membuat gagal suatu tujuan. Berdasarkan pengertian kontribusi yang dikemukakan diatas maka dapat diartikan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah sangat penting untuk mengembangkan kemajuan daerah. Dalam mengetahui Kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah.

4. Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Siahaan (2005). Hal ini dapat menjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak.

Penerimaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Siahaan 2013:9). Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa, 2005)

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan pemerintah daerah (Perda) yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Siahaan, 2005: 10).

Prawoto (2011: 420) menyatakan bahwa terdapat empat kriteria mengenai pajak daerah. Keempat kriteria tersebut adalah :

1. Kecukupan dan elastisitas. Kecukupan maksudnya bahwa sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Sedangkan elastisitas adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas pengeluaran pemerintah daerah.
2. Keadilan. Prinsip keadilan ini adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kesanggupan masing-masing golongan.
3. Kemampuan administratif. Untuk menilai suatu pajak agar dapat memenuhi tuntutan keadilan dan pemerataan, maka dibutuhkan suatu administrasi yang baik dan fleksibel. Dimana administrasi pemungutan pajak harus sederhana, mudah dihitung, dan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.
4. Adanya kesepakatan politik.

5. Jenis-jenis Pajak Daerah

Sesuai Pasal 1 angka 10 UU PDRD, dijelaskan pengertian Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Zuraida, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
- c. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- d. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah imbalan atau jasa secara langsung.
- e. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
- f. Digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membedakan 2 (dua) jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan, dan
- e. Pajak Rokok.

Adapun jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak diatas, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) menegaskan bahwa jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai adan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom.

6. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:15) pemungutan pajak daerah dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakann Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau nota

perhitungan. Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku dewasa ini. Sistem pemungutan pajak daerah itu diantaranya ialah dengan sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem pengaitan, sistem benda berharga dan sistem kartu.

7. Retribusi Daerah

Secara umum, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Dalam konteks daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2005: 5).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya dengan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Sedangkan tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau ada perbedaan tentang golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu (Prakosa, 2005: 134).

8. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Karakteristik pemungutan retribusi daerah adalah sebagai berikut (Zuraida, 2013).

1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
3. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomi. Artinya, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
4. Hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah.
5. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penggolongan retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan dengan uraian Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Penggolongan Retribusi Daerah

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Pelayanan Kesehatan • Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan • Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil • Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat • Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum • Retribusi Pelayanan Pasar • Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor • Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran • Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta • Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus • Retribusi Pengolahan Limbah Cair • Retribusi Pelayanan Tera/tera ulang • Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan • Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah • Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. • Retribusi Tempat Pelelangan • Retribusi Terminal • Retribusi Tempat Khusus Parkir • Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa • Retribusi Rumah Potong Hewan • Retribusi Pelayanan Keperlabuhan • Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga • Retribusi Penyeberangan di Air, dan • Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Izin Mendirikan Bangunan • Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol • Retribusi Izin Gangguan • Retribusi Izin Trayek, dan • Retribusi Izin Usaha Perikanan

9. Efektivitas

Efektivitas Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas juga berarti pemanfaatan sumber daya, saran prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran,

berarti makin tinggi efektivitasnya.dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisley).

